

**POLITIK PRAGMATISME DALAM PERSPEKTIF MACHIAVELLISME PADA
KEPEMIMPINAN PRESIDEN JOKO WIDODO TAHUN 2014-2024**

Razan Siregar, Nur Hidayat Sardini

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id**

ABSTRACT

*Post-reform political dynamics in Indonesia are characterized by a multiparty system, fluid political coalitions, and intense electoral competition, which necessitate that political leaders adopt adaptive and effective governance strategies. In this context, the leadership of President Joko Widodo during the 2014–2024 period is noteworthy for its tendency toward pragmatic political practices in managing power. This study aims to analyze political pragmatism in Joko Widodo's leadership through the perspective of Machiavellianism. The research employs a qualitative approach using a literature review method, drawing on secondary data from academic literature, policy documents, institutional reports, and relevant media coverage. The analysis is based on key concepts from Machiavelli's *Il Principe*, including power pragmatism, political consolidation, legitimacy management, and the relationship between power and state institutions. The findings indicate that Jokowi's leadership is characterized by pragmatic political strategies, such as the formation of broad political coalitions, the management of opposition, and the use of public policy and legal instruments to maintain governmental effectiveness and political stability. This study shows that Machiavellian thought remains relevant as an analytical framework for understanding contemporary power practices in Indonesian democracy, particularly in examining leadership that emphasizes strategic flexibility and the sustainability of political stability.*

Keywords: *Political pragmatism, Machiavellism, power, Joko Widodo, Indonesian democracy*

ABSTRAK

Dinamika politik Indonesia pascareformasi ditandai oleh sistem multipartai, koalisi politik yang cair, serta kompetisi elektoral yang intens, sehingga menuntut pemimpin politik untuk mengadopsi strategi yang adaptif dan efektif. Dalam konteks tersebut, kepemimpinan Presiden Joko Widodo sepanjang periode 2014–2024 menarik untuk dianalisis karena memperlihatkan kecenderungan praktik politik pragmatis dalam pengelolaan kekuasaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik politik pragmatis dalam kepemimpinan Joko Widodo melalui perspektif Machiavellianisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, dengan memanfaatkan data sekunder berupa literatur akademik, dokumen kebijakan, laporan lembaga, dan pemberitaan media yang relevan. Analisis dilakukan dengan merujuk pada konsep-konsep utama Machiavelli dalam *Il Principe*, seperti pragmatisme kekuasaan, konsolidasi politik, pengelolaan legitimasi, serta relasi antara kekuasaan dan institusi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Jokowi ditandai oleh strategi politik pragmatis melalui pembentukan koalisi politik yang luas, pengelolaan oposisi, serta pemanfaatan kebijakan publik dan instrumen hukum untuk menjaga efektivitas dan stabilitas pemerintahan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa pemikiran Machiavelli masih relevan sebagai kerangka analitis untuk memahami praktik kekuasaan dalam demokrasi kontemporer Indonesia, khususnya dalam membaca kepemimpinan yang menekankan fleksibilitas strategi dan keberlanjutan stabilitas politik.

Kata kunci: Pragmatisme politik, Machiavellisme, kekuasaan, Joko Widodo, demokrasi Indonesia.

PENDAHULUAN

Dinamika politik Indonesia pascareformasi memperlihatkan konfigurasi kekuasaan yang semakin kompleks, ditandai oleh pelembagaan demokrasi elektoral, sistem multipartai yang terfragmentasi, serta pola koalisi politik yang bersifat cair. Dalam sistem multipartai, proses pengambilan keputusan politik umumnya tidak hanya ditentukan oleh orientasi ideologis partai, tetapi juga oleh negosiasi kepentingan antarelite dan kebutuhan menjaga stabilitas pemerintahan (Dahl, 1961). Kondisi tersebut mendorong berkembangnya praktik politik yang bersifat pragmatis, di mana fleksibilitas strategi dan orientasi pada hasil menjadi elemen penting dalam pengelolaan kekuasaan.

Dalam konteks tersebut, kepemimpinan Joko Widodo menempati posisi yang signifikan dalam politik Indonesia kontemporer. Berangkat dari latar belakang politik lokal dan tampil sebagai figur di luar elite tradisional, Jokowi membangun citra kepemimpinan yang menekankan kedekatan simbolik dengan rakyat serta pendekatan teknokratik dalam pemerintahan. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan ini berperan penting dalam membangun legitimasi politik Jokowi di tingkat nasional (Kipp, 2018). Namun, dalam praktik

pemerintahan selama periode 2014–2024, kepemimpinan Jokowi juga memperlihatkan kecenderungan adaptif dan pragmatis, terutama dalam pembentukan koalisi politik yang luas dan pengelolaan relasi kekuasaan dalam sistem multipartai (Tomsa, 2020).

Kajian akademik mengenai kepemimpinan Joko Widodo sejauh ini telah berkembang dalam berbagai tema, seperti populisme, kinerja pemerintahan, dan dinamika demokrasi Indonesia. Meskipun demikian, masih relatif terbatas penelitian yang secara eksplisit menganalisis praktik politik Jokowi dengan menggunakan perspektif Machiavellisme sebagai kerangka teoritik. Sebagian besar studi cenderung bersifat deskriptif atau normatif, tanpa mengaitkan praktik kekuasaan tersebut dengan pemikiran Niccolò Machiavelli mengenai pragmatisme, konsolidasi kekuasaan, dan pengelolaan legitimasi politik (Skinner, 2000).

Padahal, pemikiran Machiavelli dalam *Il Principe* menekankan bahwa dalam realitas politik, stabilitas kekuasaan dan keberlangsungan pemerintahan seringkali menuntut pemimpin untuk bersikap fleksibel dan adaptif terhadap situasi yang dihadapi (Machiavelli, 2006). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecenderungan politik pragmatis dalam kepemimpinan Joko

Widodo melalui perspektif Machiavellianisme. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya kajian politik kontemporer Indonesia serta menunjukkan relevansi pemikiran politik klasik dalam memahami praktik kekuasaan dalam sistem demokrasi modern.

KAJIAN TEORI

a. Politik Pragmatisme

Pragmatisme merupakan sebuah pendekatan pemikiran yang menempatkan dampak praktis dan konsekuensi nyata sebagai tolok ukur utama dalam menilai kebenaran suatu gagasan, kebijakan, maupun tindakan. Dalam konteks politik, pragmatisme memandang bahwa keputusan politik tidak semata-mata didasarkan pada prinsip ideologis atau norma moral yang bersifat abstrak, melainkan pada sejauh mana keputusan tersebut efektif dalam menjawab persoalan konkret dan menjaga keberlangsungan pemerintahan. Pendekatan ini berkembang sebagai respons terhadap realitas politik yang dinamis, penuh ketidakpastian, serta sarat dengan konflik kepentingan.

Akar pemikiran pragmatisme dapat ditelusuri dari gagasan Charles Sanders Peirce melalui konsep *pragmatic maxim*, yang menyatakan bahwa makna suatu ide hanya dapat dipahami melalui konsekuensi

praktisnya. Pandangan ini kemudian dikembangkan oleh William James, yang menegaskan bahwa kebenaran tidak bersifat absolut, melainkan bergantung pada kegunaan dan manfaatnya dalam pengalaman sosial (James, 1907). Dalam ranah politik, pemahaman ini menggeser orientasi pengambilan keputusan dari kesetiaan pada doktrin menuju evaluasi berbasis hasil.

John Dewey selanjutnya mengaitkan pragmatisme dengan praktik demokrasi, dengan menekankan bahwa kebijakan publik merupakan proses eksperimental yang terus-menerus dan harus diuji melalui dampaknya terhadap kehidupan masyarakat (Dewey, 1954). Dalam kerangka ini, pragmatisme politik mendorong fleksibilitas strategi, keterbukaan terhadap kompromi, serta kemampuan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial-politik yang berkembang. Namun, pragmatisme juga mengandung potensi problematik ketika orientasi pada efektivitas jangka pendek mengabaikan prinsip akuntabilitas, etika politik, dan kualitas demokrasi.

b. Machiavellisme

Pemikiran politik Niccolò Machiavelli, terutama sebagaimana tertuang dalam *Il Principe*, menawarkan pendekatan realistik terhadap politik

dengan menempatkan kekuasaan dan stabilitas sebagai fokus utama analisis. Machiavelli secara tegas memisahkan politik dari moralitas normatif, dengan pandangan bahwa tujuan utama seorang penguasa adalah mempertahankan kekuasaan dan mencegah kekacauan, bahkan jika hal tersebut menuntut tindakan yang secara moral diperdebatkan (Machiavelli, 2006). Dalam kerangka ini, efektivitas politik menjadi ukuran utama keberhasilan kepemimpinan.

Konsep *virtù* dan *fortuna* merupakan elemen sentral dalam teori Machiavelli. *Virtù* merujuk pada kapasitas, kecerdikan, dan ketajaman strategis seorang pemimpin dalam membaca situasi politik serta mengambil keputusan yang tepat, sementara *fortuna* merepresentasikan faktor-faktor eksternal yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan. Keberhasilan seorang penguasa bergantung pada kemampuannya memanfaatkan *virtù* untuk mengendalikan atau mengantisipasi pengaruh *fortuna* (Skinner, 2000). Dengan demikian, kekuasaan dipahami sebagai hasil dari interaksi antara kemampuan aktor politik dan kondisi struktural yang terus berubah.

Machiavelli juga menekankan pentingnya pengelolaan legitimasi serta relasi antara penguasa, elite, dan rakyat. Ia berpendapat bahwa dukungan rakyat memberikan fondasi kekuasaan yang lebih

stabil dibandingkan ketergantungan semata pada elite politik, namun penguasa tetap harus mengelola elite secara strategis agar tidak menjadi ancaman bagi stabilitas rezim. Selain itu, Machiavelli menekankan peran citra publik, hukum, dan kebijakan sebagai instrumen politik yang dapat digunakan untuk memperkuat kekuasaan dan menjaga ketaatan.

Dalam konteks politik modern, Machiavellianisme tidak selalu hadir dalam bentuk kekuasaan otoriter, melainkan termanifestasi melalui strategi pragmatis yang beroperasi dalam sistem demokrasi, seperti pengelolaan koalisi, kooptasi oposisi, serta penggunaan kebijakan publik dan institusi negara untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, teori politik Machiavelli tetap relevan sebagai kerangka analitis untuk memahami praktik politik pragmatis dalam kepemimpinan kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis praktik politik pragmatis dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode 2014–2024 melalui perspektif Machiavellianisme. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penafsiran makna dan strategi kekuasaan dalam

konteks politik yang kompleks, bukan pada pengukuran kuantitatif.

Metode yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*). Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa karya Niccolò Machiavelli, *Il Principe*, yang digunakan sebagai teks utama untuk merumuskan konsep dan prinsip Machiavellianisme, seperti pragmatisme kekuasaan, *virtù* dan *fortuna*, konsolidasi politik, serta pengelolaan legitimasi. Data sekunder meliputi buku teori politik, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga, dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta pemberitaan media yang relevan dengan kepemimpinan Joko Widodo dan dinamika politik Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan seleksi sistematis terhadap sumber-sumber tertulis yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan teknik deskriptif-analitis dengan menafsirkan praktik politik dan kebijakan pemerintahan Joko Widodo berdasarkan konsep-konsep Machiavelli dalam *Il Principe* dan teori pragmatisme politik. Untuk menjaga validitas analisis, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi akademik dan non-akademik. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis

yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konteks Politik dan Pembentukan Basis Kekuasaan Joko Widodo

Konteks politik Indonesia pascareformasi ditandai oleh pelembagaan demokrasi elektoral yang berjalan bersamaan dengan fragmentasi kekuatan politik akibat sistem multipartai dan koalisi yang bersifat cair. Dalam sistem politik semacam ini, stabilitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kemenangan elektoral, tetapi juga oleh kemampuan pemimpin dalam mengelola relasi antarelite dan menjaga keseimbangan kepentingan politik yang saling berkompetisi. Studi mengenai demokrasi multipartai menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dalam sistem politik yang terfragmentasi cenderung bergantung pada negosiasi dan kompromi kekuasaan dibandingkan konsistensi ideologis semata.

Dalam konteks tersebut, Joko Widodo muncul sebagai figur politik yang relatif berada di luar lingkaran elite nasional tradisional. Berasal dari latar belakang politik lokal sebagai Wali Kota Surakarta dan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi membangun basis kekuasaan awal melalui narasi kepemimpinan yang menekankan

kesederhanaan, kedekatan simbolik dengan rakyat, serta citra sebagai representasi kepentingan publik. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa strategi populis semacam ini berfungsi efektif dalam membangun legitimasi politik, terutama dalam sistem demokrasi yang ditandai oleh ketidakpercayaan publik terhadap elite politik lama (Kipp, 2018).

Dalam perspektif Machiavelli, dukungan rakyat merupakan fondasi kekuasaan yang relatif lebih stabil dibandingkan ketergantungan semata pada elite, karena kepentingan rakyat bersifat lebih sederhana dan tidak mudah berkhianat. Machiavelli menegaskan bahwa penguasa yang mampu menempatkan diri sebagai pelindung kepentingan rakyat memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan kekuasaannya dalam situasi politik yang penuh konflik (Machiavelli, 2006). Pola ini tercermin dalam fase awal kepemimpinan Jokowi, ketika legitimasi populis digunakan sebagai modal politik untuk menghadapi resistensi elite dan memperkuat posisi dalam struktur kekuasaan nasional.

Namun, pembentukan basis kekuasaan Jokowi tidak hanya bertumpu pada citra populis, melainkan juga pada kemampuannya membaca dinamika politik nasional yang kompleks. Dalam sistem multipartai Indonesia, Jokowi secara

bertahap menyesuaikan strateginya dari konfrontasi simbolik terhadap elite lama menuju pendekatan yang lebih adaptif dan kompromistis. Penyesuaian ini menunjukkan kecenderungan politik pragmatis, di mana stabilitas pemerintahan dan keberlangsungan kekuasaan ditempatkan sebagai prioritas utama. Dengan demikian, basis kekuasaan Jokowi terbentuk melalui kombinasi antara legitimasi populis dan kemampuan strategis dalam menavigasi struktur politik multipartai, suatu pola yang mencerminkan relevansi prinsip-prinsip Machiavellian dalam konteks demokrasi elektoral kontemporer (Skinner, 2000).

b. Cara Jokowi Memperoleh Kekuasaan

Karier politik Joko Widodo mencerminkan dinamika yang relatif tidak lazim dalam politik Indonesia pascareformasi. Berangkat dari latar belakang non-elite dan pengalaman politik lokal, Jokowi memasuki arena politik nasional melalui mekanisme demokrasi elektoral yang kompetitif. Sejak awal, ia membangun legitimasi politik melalui pencitraan sebagai pemimpin yang sederhana, dekat dengan masyarakat, dan berjarak dari praktik politik elitis. Pola ini menunjukkan bahwa perolehan kekuasaan Jokowi tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan struktural partai atau jaringan elite

lama, melainkan oleh kemampuan membangun kedekatan simbolik dengan rakyat sebagai basis legitimasi awal.

Keberhasilan Jokowi dalam kontestasi politik lokal, khususnya di Surakarta dan DKI Jakarta, memperlihatkan bagaimana legitimasi populis dapat berfungsi sebagai modal politik yang efektif. Praktik blusukan dan gaya kepemimpinan yang menekankan kedekatan langsung dengan warga membentuk persepsi publik tentang Jokowi sebagai representasi kepentingan rakyat. Dominasi elektoral yang diraih pada tingkat lokal kemudian menjadi batu loncatan menuju panggung politik nasional. Transformasi ini menandai pergeseran dari kepemimpinan berbasis elite menuju kepemimpinan yang bertumpu pada legitimasi elektoral dan citra kerakyatan.

Puncak dari proses perolehan kekuasaan tersebut terjadi pada Pemilihan Presiden 2014. Kontestasi antara Jokowi dan Prabowo Subianto tidak hanya merepresentasikan persaingan elektoral, tetapi juga pertarungan simbolik antara figur penguasa baru dan representasi kekuasaan lama. Dalam perspektif Machiavelli, Jokowi dapat dipahami sebagai *principe nuovo*, yakni penguasa baru yang memperoleh legitimasi bukan dari warisan kekuasaan atau tradisi politik lama, melainkan dari dukungan rakyat secara langsung (Machiavelli, 2006).

Kejenuhan publik terhadap elite lama berfungsi sebagai *fortuna* politik yang membuka peluang bagi munculnya figur alternatif.

Konfrontasi simbolik terhadap elite politik lama semakin menguat melalui narasi representasi rakyat melawan hegemoni oligarki. Sejalan dengan pemikiran Machiavelli dalam Bab IX *Il Principe*, konflik antara *il popolo* dan *i grandi* merupakan kondisi struktural dalam politik. Jokowi memosisikan dirinya sebagai figur yang berpihak pada rakyat, sehingga memperoleh legitimasi yang relatif lebih stabil dibandingkan ketergantungan pada elite yang sarat dengan intrik dan kepentingan sempit (Skinner, 2000).

Populisme dalam konteks ini tidak berfungsi sebagai ideologi normatif, melainkan sebagai instrumen kekuasaan yang bersifat pragmatis. Jokowi mengeksploitasi simbol kesederhanaan, narasi anti-elit, serta kedekatan emosional dengan rakyat untuk membangun basis dukungan lintas kelas. Peran media massa dan media sosial menjadi krusial dalam memperluas jangkauan narasi tersebut. Meskipun menghadapi ketimpangan akses terhadap media arus utama, Jokowi memanfaatkan media alternatif dan jaringan relawan digital untuk membangun *counter discourse* yang efektif dan

memperkuat citra sebagai pemimpin rakyat (Juditha, 2015; Jati, 2016).

Aktivisme relawan dan kelas menengah urban pada Pemilu 2014 memperlihatkan bagaimana dukungan yang pada awalnya bersifat organik dapat dikelola secara strategis. Dalam kerangka Machiavellian, keberhasilan Jokowi terletak pada kemampuannya mengubah simpati rakyat (*fortuna*) menjadi kekuatan politik terorganisir melalui kecakapan strategis (*virtù*). Dengan demikian, cara Jokowi memperoleh kekuasaan mencerminkan praktik Machiavellian modern, yakni penggunaan legitimasi rakyat, citra moral, dan populisme sebagai instrumen strategis dalam perebutan kekuasaan di dalam sistem demokrasi elektoral.

c. Cara Joko Widodo Mempertahankan Kekuasaan

Dalam pemikiran Niccolò Machiavelli, mempertahankan kekuasaan merupakan persoalan yang lebih menentukan dibanding sekadar merebutnya. Kekuasaan selalu berada dalam kondisi rentan karena dikelilingi oleh ancaman elite lama, oposisi politik, serta perubahan kehendak rakyat. Oleh karena itu, penguasa dituntut untuk membaca situasi politik secara realistis dan menggunakan seluruh instrumen yang

tersedia demi menjaga stabilitas kekuasaan. Instrumen tersebut meliputi hukum, institusi negara, serta legitimasi simbolik sebagaimana dijelaskan dalam *Il Principe*.

Joko Widodo memasuki kekuasaan nasional sebagai *príncipe nuovo*, yaitu penguasa baru yang tidak berasal dari aristokrasi politik lama, tidak memiliki basis militer, dan tidak menguasai partai politik secara penuh. Kemenangan elektoral pada Pemilu Presiden 2014 tidak secara otomatis memberinya kendali atas struktur kekuasaan negara. Parlemen dikuasai oposisi, birokrasi masih dipenuhi jaringan elite lama, dan partai pengusungnya sendiri berada di bawah dominasi elite senior. Dalam *Il Principe*, kondisi ini digambarkan sebagai situasi paling berbahaya bagi penguasa baru karena struktur lama yang belum sepenuhnya runtuh dapat sewaktu-waktu menjadi sumber perlawanan.

Alih-alih menghancurkan tatanan lama secara frontal, Jokowi memilih strategi konsolidasi bertahap. Pendekatan ini selaras dengan anjuran Machiavelli agar penguasa mampu menyesuaikan diri dengan perubahan situasi politik. Jokowi menghindari konfrontasi terbuka di awal pemerintahan dan memprioritaskan stabilitas sebagai prasyarat kelanggengan kekuasaan. Dalam konteks ini, legitimasi elektoral berfungsi sebagai fondasi awal, tetapi belum cukup tanpa penguasaan institusional yang efektif (Mietzner, 2015).

Strategi utama dalam mempertahankan kekuasaan dilakukan melalui kooptasi elite dan netralisasi oposisi. Dalam *Il Principe* Bab IX, elite atau *i grandi* dipandang sebagai ancaman paling serius karena memiliki sumber daya dan ambisi politik. Oleh sebab itu, elite harus ditundukkan melalui eliminasi atau kooptasi. Jokowi memilih jalur kooptasi dengan menarik partai-partai oposisi ke dalam pemerintahan. Dalam waktu relatif singkat, koalisi oposisi pasca Pemilu 2014 terpecah dan melebur ke dalam barisan pendukung pemerintah, melemahkan kapasitas oposisi parlemen secara signifikan (Mietzner, 2019).

Pola tersebut mencerminkan logika Machiavellian yang dapat dibandingkan dengan kisah Cesare Borgia, ketika elite lama tidak dihancurkan secara serentak, tetapi ditundukkan dan dibuat bergantung pada penguasa baru. Dalam konteks demokrasi Indonesia, kooptasi dilakukan melalui distribusi kekuasaan dan akses institusional. Elite yang bergabung memperoleh keuntungan politik, tetapi sekaligus terikat pada stabilitas rezim (Aspinall & Warburton, 2018).

Kooptasi elite diperkuat oleh penggunaan hukum sebagai instrumen kekuasaan. Dalam *Il Principe*, hukum tidak dipahami sebagai pembatas kekuasaan, melainkan sebagai sarana untuk menjaga *ordine politico* dan mencegah kekacauan.

Pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang mampu menggunakan hukum dan institusi untuk mendisiplinkan kehidupan politik.

Ilustrasi Machiavelli mengenai kerajaan Turki menunjukkan bagaimana hukum dan birokrasi yang sepenuhnya tunduk pada penguasa pusat menciptakan stabilitas tinggi. Tidak ada bangsawan lokal yang otonom, dan hukum berfungsi sebagai mekanisme kepatuhan, bukan arena perlawanan. Model ini dikontraskan dengan kerajaan Prancis yang lebih terdesentralisasi dan karenanya lebih rentan terhadap fragmentasi kekuasaan (*Il Principe*, Bab IV).

Dalam konteks pemerintahan Jokowi, hukum beroperasi sebagai bentuk *legalisme otokratis*. Kekuasaan tidak dijalankan dengan menangguk hukum, melainkan melalui hukum itu sendiri. Regulasi, kebijakan administratif, dan prosedur institusional digunakan untuk menata ulang relasi kekuasaan secara sah. Oposisi politik dilemahkan melalui mekanisme legal yang tampak konstitusional, bukan melalui represi terbuka (Aspinall & Warburton, 2018).

Legalisme ini diperkuat oleh peran aparatus negara sebagai perpanjangan dari kehendak politik penguasa. Institusi negara berfungsi sebagai pelaksana kebijakan yang telah dilegalkan, bukan sebagai penyeimbang kekuasaan. Dalam

praktiknya, birokrasi menjadi instrumen stabilisasi politik melalui kepatuhan hierarkis dan disiplin administratif (Mietzner, 2020).

Kecenderungan sentralisasi kekuasaan juga menjadi bagian penting dari strategi mempertahankan kekuasaan. Dalam *Il Principe*, Machiavelli menegaskan bahwa kerajaan yang terpusat lebih mudah dikendalikan karena tidak memiliki elite lokal yang otonom. Dalam pemerintahan Jokowi, relasi pusat dan daerah menunjukkan pergeseran ke arah penguatan kendali pusat melalui penarikan kewenangan strategis dan penguatan kontrol administratif (Brodjonegoro & Martinez-Vazquez, 2004).

Pada periode kedua pemerintahan, strategi ini mencapai tahap paling matang. Bergabungnya Prabowo Subianto ke dalam kabinet pasca Pemilu 2019 menandai puncak kooptasi oposisi. Dalam *Il Principe*, musuh yang dinetralkan melalui integrasi dinilai lebih aman dibanding musuh yang dibiarkan berada di luar kekuasaan. Koalisi besar tersebut menciptakan stabilitas legislatif sekaligus memperkuat dominasi eksekutif (Mietzner, 2020; Lane, 2019).

Dengan demikian, cara Joko Widodo mempertahankan kekuasaan mencerminkan adaptasi pemikiran Machiavelli dalam konteks demokrasi elektoral modern. Stabilitas pemerintahan dicapai melalui konsolidasi elite, kooptasi

oposisi, penggunaan hukum sebagai *legalisme otokratis*, pengendalian aparatus negara, dan sentralisasi kewenangan. Demokrasi tidak ditanggihkan, tetapi dikelola secara pragmatis dan terkendali (Aspinall & Warburton, 2018; Mietzner, 2020).

d. Kebijakan Publik dan Ekonomi sebagai Basis Legitimasi

Dalam *Il Principe*, Machiavelli menegaskan bahwa keberhasilan seorang penguasa tidak ditentukan oleh niat baik atau konsistensi moral, melainkan oleh kemampuannya mempertahankan kekuasaan melalui pengelolaan hubungan antara rakyat dan elite. Kekuasaan, bagi Machiavelli, selalu berada dalam situasi rapuh karena dikepung oleh dua sumber ancaman utama, yaitu kehendak rakyat yang mudah berubah dan ambisi elite yang tidak pernah puas. Oleh karena itu, kebijakan publik tidak boleh dipahami sebagai tindakan administratif netral, melainkan sebagai instrumen strategis untuk mengatur *amore* dan *paura*, membentuk *apparenza*, serta menjaga *ordine* politik.

Dalam konteks ini, kebijakan ekonomi pemerintahan Joko Widodo dapat dibaca sebagai praktik Machiavellian dalam format demokrasi elektoral modern. Jokowi tidak memerintah melalui ideologi

ekonomi yang konsisten, melainkan melalui kalkulasi *verità effettuale* tentang bagaimana stabilitas politik dapat dijaga dalam sistem multipartai yang oligarkis dan berbiaya tinggi (Mietzner, 2015; Aspinall & Warburton, 2018). Kebijakan ekonomi menjadi arena utama untuk mengikat loyalitas rakyat dan elite secara simultan.

Bagi Machiavelli, rakyat harus dijaga dalam kondisi tidak membenci penguasa, tetapi juga tidak cukup kuat untuk menantangnya. Dalam kerangka ini, *benefici* atau pemberian memainkan peran sentral. Subsidi energi dan bantuan sosial di era Jokowi berfungsi sebagai bentuk *benefici* yang menciptakan ketergantungan struktural rakyat terhadap negara. Dengan mempertahankan subsidi energi pada kisaran 8–11 persen dari belanja negara dan menanggung lonjakan kompensasi hingga sekitar Rp 502 triliun pada 2022, negara tampil sebagai satu-satunya aktor yang mampu menjamin stabilitas harga dan daya beli (Barnes & Teguh, 2022). Dalam perspektif Machiavelli, kebijakan semacam ini tidak bertujuan menciptakan kesejahteraan jangka panjang, melainkan mencegah kebencian publik yang dapat berujung pada instabilitas politik.

Distribusi bantuan sosial memperdalam relasi Machiavellian tersebut. Machiavelli menulis bahwa penguasa yang bijak harus memastikan rakyat selalu membutuhkan negara.

Program bantuan sosial dan bansos di era Jokowi, terutama pada periode menjelang kontestasi elektoral, menciptakan relasi asimetris antara negara dan warga. Kesejahteraan tidak dipersepsikan sebagai hak struktural, melainkan sebagai hasil kehadiran langsung penguasa. Dalam konteks ini, loyalitas politik dibangun bukan melalui kesadaran ideologis, tetapi melalui rasa aman material yang dikaitkan dengan keberlangsungan rezim (Mietzner, 2020).

Namun, Machiavelli menegaskan bahwa penguasa tidak boleh hanya bergantung pada rakyat. Ancaman paling berbahaya justru datang dari elite, karena mereka memiliki sumber daya, jaringan, dan ambisi untuk menggulingkan kekuasaan. Oleh karena itu, elite harus ditundukkan melalui dua cara: dihancurkan atau dijadikan bergantung. Jokowi secara konsisten memilih opsi kedua. Kebijakan pembangunan infrastruktur menjadi instrumen utama untuk mengikat elite ekonomi ke dalam orbit kekuasaan.

Empat BUMN konstruksi utama, yaitu WIKA, PTPP, ADHI, dan Hutama Karya, menjadi simpul patronase ekonomi negara. Nilai kontrak baru yang mencapai puluhan triliun rupiah per tahun menempatkan kelangsungan bisnis BUMN tersebut sepenuhnya bergantung pada keputusan politik eksekutif pusat (Salim & Negara, 2018; Mietzner, 2021). Dalam

istilah Machiavelli, elite semacam ini tidak lagi memiliki *armi proprie* atau kekuatan mandiri. Mereka hidup dari kemurahan penguasa dan karena itu memiliki insentif kuat untuk menjaga stabilitas rezim.

Pola serupa terlihat dalam sektor energi dan pertambangan. Penguatan peran Pertamina, konsolidasi MIND ID, serta kebijakan hilirisasi tambang menciptakan konfigurasi di mana akses terhadap rente ekonomi bergantung pada kedekatan dengan negara. Pengambilalihan 51 persen saham PT Freeport Indonesia pada 2018 tidak hanya memiliki makna simbolik nasionalisme ekonomi, tetapi juga membuka ruang distribusi proyek smelter dan kontrak strategis kepada aktor bisnis yang terintegrasi dengan kekuasaan (Aspinall & Berenschot, 2020; Warburton, 2020). Dalam kerangka Machiavellian, ini adalah bentuk *amore* yang diberikan kepada elite agar mereka tidak berubah menjadi musuh.

Machiavelli juga memperingatkan bahwa kemurahan hati yang bersumber dari pajak langsung akan melahirkan kebencian. Di titik inilah kebijakan fiskal Jokowi menunjukkan kecermatan Machiavellian. Untuk membiayai subsidi, bansos, dan infrastruktur, pemerintah lebih memilih memperluas utang daripada menaikkan pajak secara agresif. Rasio utang terhadap PDB yang meningkat hingga sekitar 39–41 persen pada 2020–2022 memungkinkan

negara tampil murah hati tanpa memicu kemarahan publik karena beban fiskal tidak dirasakan secara langsung (World Bank). Dalam logika Machiavelli, beban yang tertunda selalu lebih aman daripada pungutan yang dirasakan segera.

Ketika kenaikan pajak tidak dapat dihindari, seperti kenaikan PPN menjadi 11 persen pada 2022, kebijakan tersebut dibingkai sebagai kebutuhan institusional negara pascapandemi, bukan kehendak personal penguasa. Pembungkai ini berfungsi sebagai *apparenza* yang meredam persepsi pengambilan paksa dan menghindari atribusi kebencian langsung kepada presiden (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022; BBC News Indonesia, 2022). Machiavelli menegaskan bahwa penguasa boleh mengambil dari rakyat, tetapi tidak boleh tampak sebagai perampas.

Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi Jokowi mencerminkan praktik *raison d'état* dalam konteks demokrasi elektoral. Patronase proyek kepada elite ekonomi, subsidi dan bansos kepada rakyat, serta pembiayaan melalui utang membentuk satu konfigurasi kekuasaan yang saling menopang. Elite tidak memiliki insentif untuk melawan karena bergantung pada negara, sementara rakyat tidak memiliki dorongan kuat untuk menentang karena stabilitas ekonomi sehari-hari dijaga. Dalam istilah Machiavelli, Jokowi

berhasil menjaga *ordine* tanpa harus mengandalkan represi terbuka.

Dengan demikian, kebijakan ekonomi Jokowi tidak dapat direduksi sebagai kebijakan populis atau teknokratis semata. Ia merupakan praktik Machiavellian yang konsisten, di mana kekuasaan dipertahankan melalui distribusi *benefici*, pengelolaan ketergantungan, dan kontrol elite secara tidak langsung. Inilah yang menjelaskan mengapa kebijakan seperti bansos dan bagi-bagi proyek kepada elite ekonomi bukan anomali demokrasi, melainkan mekanisme rasional dalam logika kekuasaan Machiavelli yang diterapkan dalam konteks Indonesia kontemporer.

e. Warisan Kekuasaan Jokowi

Dalam pemikiran Niccolò Machiavelli, kekuasaan tidak berhenti pada momen seorang penguasa turun dari jabatan formalnya. Kekuasaan, dalam *Il Principe*, dipahami sebagai relasi yang terbentuk dari reputasi, jaringan loyalitas, serta kemampuan menjaga kesinambungan pengaruh dalam struktur sosial dan politik. Oleh karena itu, seorang penguasa yang berhasil bukan hanya mereka yang mampu memerintah, tetapi mereka yang mampu memastikan bahwa kekuasaannya tidak runtuh setelah ia pergi. Kerangka ini memberikan landasan teoretik yang relevan

untuk membaca strategi Joko Widodo dalam mempertahankan pengaruh politik pascakepresidenan.

Machiavelli menekankan pentingnya *fama* atau reputasi sebagai sumber kekuasaan simbolik yang bertahan melampaui masa jabatan. Reputasi yang kuat memungkinkan penguasa lama tetap menjadi rujukan politik bagi rakyat maupun elite, bahkan tanpa otoritas institusional langsung. Dalam konteks Jokowi, reputasi ini dibangun melalui narasi keberhasilan pembangunan, citra kesederhanaan, serta persepsi efektivitas kepemimpinan yang direproduksi secara konsisten selama dua periode pemerintahan. Reputasi tersebut menciptakan legitimasi jangka panjang yang membuat Jokowi tetap relevan sebagai aktor politik kunci menjelang dan setelah transisi kekuasaan (Budiman, 2023; Utomo, 2023).

Selain reputasi, Machiavelli menegaskan pentingnya jaringan patronase sebagai penopang keberlanjutan kekuasaan. Dalam *Il Principe* Bab IX, ia menjelaskan bahwa stabilitas kekuasaan hanya dapat dijaga jika penguasa memiliki basis dukungan dari rakyat dan elite secara simultan. Jaringan loyalis yang tertanam dalam birokrasi, partai politik, dan lingkaran ekonomi akan terus bekerja sebagai perpanjangan pengaruh penguasa lama, meskipun posisi formalnya telah berakhir. Dalam konteks Jokowi, jaringan

ini terbentuk melalui konsolidasi patronase selama dua periode pemerintahan, yang memungkinkan struktur kekuasaan tetap beroperasi sesuai kepentingannya pascapemilu 2024.

Dalam kerangka ini, Indonesia pada akhir pemerintahan Jokowi menunjukkan kecenderungan sebagai *negara warisan* dalam pengertian Machiavellian. Negara warisan tidak dipahami sebagai pewarisan biologis, melainkan sebagai kondisi ketika struktur kekuasaan telah dipadatkan sedemikian rupa sehingga loyalitas politik, birokrasi, dan persepsi publik terikat pada figur tertentu. Machiavelli menjelaskan bahwa negara semacam ini sulit direbut karena penguasa berhasil menginternalisasi kehendaknya ke dalam mekanisme pemerintahan. Dalam konteks Jokowi, proyek infrastruktur, sentralisasi kewenangan, dan pelemahan oposisi menciptakan ketergantungan politik yang membuat kelangsungan negara seolah identik dengan keberlanjutan pengaruhnya.

Transformasi Jokowi dari *pangeran baru* menjadi figur hegemonik tampak jelas menjelang akhir masa jabatan. Alih-alih mengalami *lame duck effect*, Jokowi justru memperluas pengaruhnya melalui penguatan jaringan patronase baru, keterlibatan keluarga dalam kontestasi elektoral, serta mobilisasi relawan sebagai basis kekuatan politik non-institusional. Pola ini sejalan dengan prinsip Machiavelli

bahwa penguasa yang memahami dinamika kekuasaan akan menyiapkan kesinambungan pengaruh melalui loyalis, bukan semata melalui lembaga formal negara.

Dalam konteks ini, Jokowiisme dapat dipahami sebagai *fama Machiavellian*. Jokowiisme bukan ideologi yang terartikulasikan secara doktrinal, melainkan gaya kekuasaan yang berwatak pragmatis, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Media dan kajian akademik menggambarkan Jokowiisme sebagai “langgam kekuasaan” yang menekankan fleksibilitas politik, citra kesederhanaan, dan kedekatan simbolik dengan rakyat (Budiman, 2023; Utomo, 2023). Identifikasi emosional seperti “Jokowi is me” menunjukkan bahwa reputasi Jokowi telah menjelma menjadi sumber legitimasi personal yang melampaui struktur partai politik.

Kekuatan *fama* ini terlihat ketika loyalitas politik terhadap Jokowi terbukti lebih kuat dibanding loyalitas terhadap PDIP. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa menjelang Pemilu 2024, kontrol PDIP terhadap Jokowi semakin melemah, sementara Jokowi justru menjadi pusat gravitasi kekuasaan baru yang mampu menggerakkan elite dan relawan di luar kendali partai (Safrudiningsih et al., 2023; Santika, 2023). Dalam perspektif Machiavelli, kondisi ini menandakan

keberhasilan penguasa mengubah popularitas menjadi kekuasaan simbolik yang dapat diwariskan.

Strategi menjaga keberlanjutan pengaruh semakin nyata melalui peran relawan. Dalam *Il Principe*, Machiavelli membedakan antara *le proprie armi* (kekuatan sendiri) dan *armi altrui* (kekuatan orang lain). Penguasa yang bergantung pada kekuatan orang lain akan selalu rapuh karena loyalitas elite bersifat oportunistik. Sebaliknya, kekuatan yang bersumber dari rakyat lebih stabil karena tidak memiliki ambisi merebut kekuasaan. Relawan Jokowi dapat dipahami sebagai bentuk modern *le proprie armi*, karena loyalitas mereka berpaut pada figur Jokowi, bukan pada partai atau institusi formal.

Relawan seperti Projo, Seknas Jokowi, Jokowi Mania, dan BaraJP berkembang dari mesin kampanye menjadi jaringan politik semi-terorganisir dengan kapasitas mobilisasi dan produksi narasi yang mandiri (Septia, 2022; Yuwanto & Sardini, 2024). Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi, yang mencapai 76,8 persen pada 2023 dan mendekati 80 persen pada awal 2024, memperkuat legitimasi personal Jokowi dan membuat relawan menjadi instrumen politik yang efektif untuk menjaga kesinambungan pengaruhnya (Muhtadi, 2023).

Puncak dari strategi keberlanjutan kekuasaan Jokowi tampak dalam fenomena

cawe-cawe Pemilu 2024. Dalam perspektif Machiavelli, penguasa yang bijak harus memastikan bahwa kekuasaan pascakepemimpinannya jatuh ke tangan pihak yang dapat menjamin stabilitas dan melindungi warisannya. Keterlibatan Jokowi dalam membentuk arah suksesi, mendukung pasangan Prabowo–Gibran, serta memobilisasi jaringan relawan dan elite menunjukkan upaya sistematis menjaga *continuity of power* (Petlach & Říčanová, 2025; Mietzner, 2024).

Intervensi Jokowi tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga menyentuh lembaga-lembaga kunci demokrasi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka jalan bagi pencalonan Gibran Rakabuming Raka, respons cepat KPU dalam menyesuaikan regulasi, serta mobilisasi birokrasi dan aparat negara memperlihatkan bagaimana struktur negara digunakan untuk mengamankan suksesi politik yang menguntungkan Jokowi (Hukumonline, 2023; CNN Indonesia, 2023; Tempo, 2023). Sejumlah kajian menilai praktik ini sebagai bagian dari *democratic backsliding* yang dipercepat oleh dominasi eksekutif dan lemahnya mekanisme pengawasan (Mietzner, 2024; Astuti & Setyarini, 2024).

Dengan demikian, keberlanjutan kekuasaan Jokowi mencerminkan praktik Machiavellian dalam konteks demokrasi elektoral modern. Kekuasaan tidak

diwariskan melalui mekanisme formal, tetapi melalui reputasi, jaringan loyalis, relawan, serta kontrol atas suksesi politik. *Cawe-cawe* Pemilu 2024 bukan anomali, melainkan ekspresi rasional dari logika kekuasaan Machiavelli yang menempatkan stabilitas dan kesinambungan pengaruh sebagai tujuan utama penguasa.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Joko Widodo sepanjang periode 2014–2024 dapat dipahami secara lebih jernih melalui perspektif Machiavellianisme, khususnya dalam membaca praktik politik pragmatis yang berorientasi pada stabilitas, konsolidasi kekuasaan, dan keberlanjutan pengaruh. Dalam konteks sistem politik Indonesia pascareformasi yang ditandai oleh multipartai, koalisi cair, dan kompetisi elite yang intens, Jokowi tidak memerintah melalui konsistensi ideologis, melainkan melalui fleksibilitas strategi yang menyesuaikan diri dengan dinamika kekuasaan yang dihadapi.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa praktik Machiavellian Jokowi termanifestasi dalam beberapa dimensi kunci. Pertama, dalam cara memperoleh kekuasaan, Jokowi tampil sebagai *principe nuovo* yang memanfaatkan legitimasi rakyat dan simbol populisme sebagai modal awal untuk

menembus struktur elite lama. Kedua, dalam mempertahankan kekuasaan, Jokowi mengadopsi strategi konsolidasi melalui kooptasi elite, pembentukan koalisi besar, penggunaan hukum dan institusi negara sebagai instrumen legalisme kekuasaan, serta sentralisasi kewenangan guna meminimalkan potensi perlawanan politik. Ketiga, kebijakan publik dan ekonomi berfungsi sebagai instrumen legitimasi Machiavellian, di mana subsidi, bantuan sosial, dan distribusi proyek strategis digunakan untuk menjaga loyalitas rakyat dan ketergantungan elite ekonomi terhadap negara.

Lebih jauh, penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik Machiavellian Jokowi tidak berhenti pada masa jabatan formalnya. Melalui pengelolaan reputasi (*fama*), jaringan patronase, relawan sebagai *le proprie armi*, serta intervensi aktif dalam suksesi politik, Jokowi berupaya memastikan keberlanjutan pengaruh pascakepresidenan. Fenomena *cawe-cawe* pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa dalam kerangka Machiavelli, penguasa yang rasional tidak membiarkan transisi kekuasaan berlangsung tanpa kendali, melainkan menata arah suksesi agar warisan kekuasaan dan kepentingan politiknya tetap terjaga.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa Machiavellianisme

tetap relevan sebagai kerangka analitis untuk memahami praktik kekuasaan dalam demokrasi elektoral modern. Dalam kasus Indonesia, demokrasi tidak ditangguhkan secara formal, tetapi dikelola melalui logika pragmatis yang menempatkan stabilitas dan keberlangsungan kekuasaan sebagai prioritas utama. Studi ini berkontribusi pada pengayaan kajian politik Indonesia dengan menunjukkan bahwa praktik kekuasaan kontemporer tidak dapat sepenuhnya dipahami melalui dikotomi demokrasi versus otoritarianisme, melainkan melalui analisis realistis tentang bagaimana kekuasaan dijalankan, dipertahankan, dan diwariskan dalam batas-batas prosedur demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2020). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Aspinall, E., & Warburton, E. (2018). Indonesia: The dangers of democratic regression. *Journal of Democracy*, 29(4), 63–77.
- Astuti, P., & Setyarini, R. (2024). Politik dinasti dan pelemahan demokrasi di Indonesia kontemporer. *Jurnal Politik Indonesia*, 9(1), 1–17.
- Barnes, P., & Teguh, S. (2022). Fuel subsidy politics and distributive conflict in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 58(3), 345–367.
- BBC News Indonesia. (2022). *Kenaikan PPN 11 persen dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat*. BBC News Indonesia.
- Brodjonegoro, B., & Martinez-Vazquez, J. (2004). An analysis of Indonesia's transfer system: Recent performance and future prospects. *International Studies Program Working Paper*. Georgia State University.
- CNN Indonesia. (2023). *Putusan MK soal batas usia dan respons cepat KPU*. CNN Indonesia.
- Hukumonline. (2023). *MKMK nyatakan Anwar Usman melanggar etik berat*. Hukumonline.
- James, W. (1907). *Pragmatism: A new name for some old ways of thinking*. New York: Longmans, Green, and Co.
- Jati, W. R. (2016). Media sosial dan populisme dalam politik Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 20(2), 123–137.
- Juditha, C. (2015). Media sosial dan politik Indonesia. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 18(2), 129–144.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan kebijakan fiskal pascapandemi*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Lane, M. (2019). Indonesia: The persistence of oligarchy. *New Left Review*, 117, 45–63.
- Machiavelli, N. (2006). *Il Principe*. Oxford: Oxford University Press. (Pertama kali diterbitkan 1532)
- Mietzner, M. (2015). *Reinventing Asian populism: Jokowi's rise, democracy, and political contestation in Indonesia*. *Policy Studies*, 72.
- Mietzner, M. (2019). Authoritarian innovations in Indonesia: Electoral narrowing, identity politics, and executive illiberalism. *Democratization*, 26(6), 1021–1036.
- Mietzner, M. (2020). Rival populisms and the democratic crisis in Indonesia. *Journal of Democracy*, 31(2), 88–102.
- Mietzner, M. (2021). Oligarchic consolidation and democratic decline in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 43(2), 219–243.
- Mietzner, M. (2024). Executive dominance and democratic backsliding in Indonesia. *Journal of Democracy*, 35(1), 1–15.
- Muhtadi, B. (2023). *Approval rating dan legitimasi politik Jokowi*. Jakarta: Indikator Politik Indonesia.
- Petlach, M., & Řičanová, Š. (2025). Democratic backsliding and executive intervention in Indonesia. *Democratization*, 32(1), 1–22.
- Safrudiningsih, S., Sudarmika, G., & Suradi, S. (2023). Relasi Jokowi–PDIP dan pergeseran pusat kekuasaan eksekutif. *Jurnal Ilmu Politik*, 14(2), 101–120.
- Salim, F., & Negara, S. D. (2018). Infrastructure development under the Jokowi administration. *ISEAS Perspective*, 2018(49).
- Santika, R. (2023). Jokowi dan politik pasca-partai di Indonesia. *Jurnal Politik Kontemporer*, 5(1), 55–72.
- Septia, R. (2022). Relawan politik dan transformasi mobilisasi elektoral. *Jurnal Komunikasi Politik*, 6(2), 89–104.
- Skinner, Q. (2000). *Machiavelli: A very short introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Tempo. (2023). *Operasi Gibran dan polemik Putusan MK*. Majalah Tempo.
- Utomo, W. (2023). Jokowiisme sebagai fenomena politik personalistik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 27(1), 1–18.

- Warburton, E. (2020). Deepening polarization and democratic decline in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 50(5), 1–20.
- World Bank. (n.d.). *Indonesia public finance and debt statistics*. World Bank Data.
- Yuwanto, & Sardini, N. (2024). Relawan politik, media sosial, dan mobilisasi elektoral. *Jurnal Penelitian Politik*, 21(1), 77–95